

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA RURALITAS DAN BUDAYA

2.1. Pengertian Rural dan Desa

2.1.1. Konsep ruralitas

Pemahaman tentang "rural" atau kawasan pedesaan telah mengalami evolusi signifikan dalam diskursus akademik. Definisi awal yang bersifat deskriptif-kuantitatif berdasarkan kepadatan penduduk rendah, dominasi sektor pertanian, atau jarak dari pusat urban, kini dianggap tidak memadai untuk menangkap kompleksitas kawasan rural kontemporer (Woods, 2011).

Halfacree (2006) mengajukan kerangka tiga dimensi (*three-fold architecture*) untuk memahami ruang rural:

1. *Locality* (Lokalitas)

Dimensi ini merujuk pada produksi material, ruang fisik, praktik ekonomi dominan (terutama pertanian industrial), dan organisasi spasial. Lokalitas dibentuk oleh praktik-praktik yang tidak hanya mengubah lanskap secara fisik, tetapi juga secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, rural dipahami sebagai ruang yang terstruktur oleh relasi produksi spesifik.

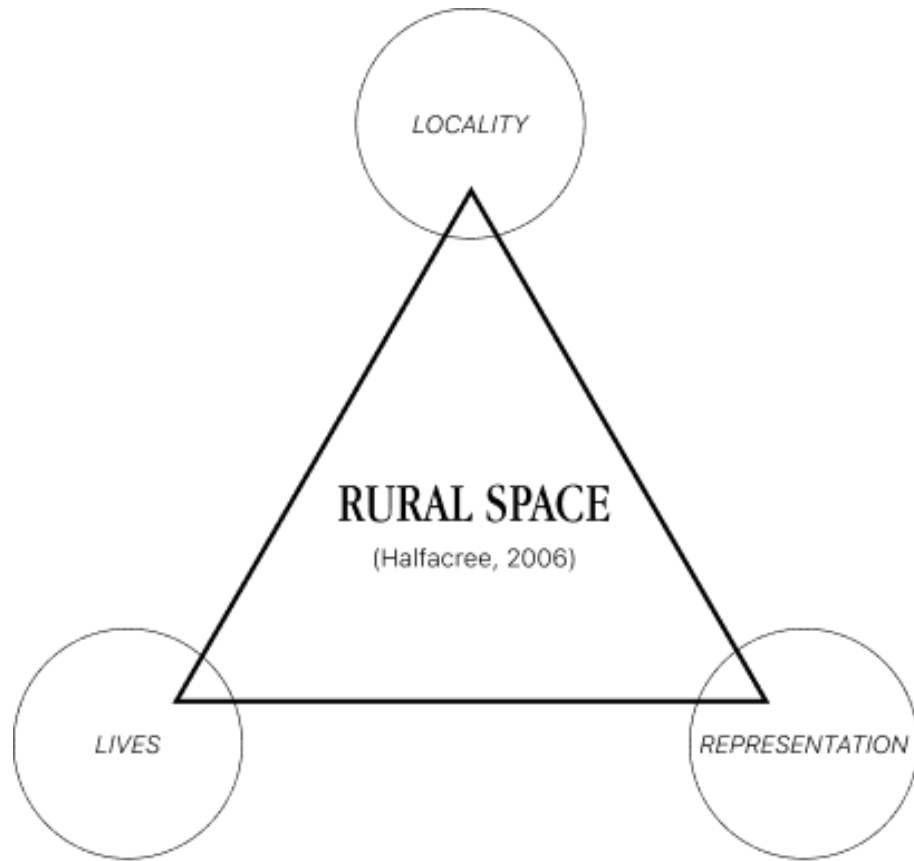
2. *Lives of the Rural* (Kehidupan Rural)

Dimensi ini mencakup pengalaman individual dan kolektif melalui mana kehidupan rural terus-menerus diinterpretasi dan dinegosiasikan. Realitas yang dialami ini secara inheren bersifat terfragmentasi dan tidak konsisten—berbeda antar kelompok sosial, generasi, gender, dan etnisitas. Kehidupan rural adalah medan kontestasi makna, di mana berbagai aktor memiliki pemahaman dan aspirasi berbeda tentang apa artinya hidup di kawasan rural.

3. *Representation* (Representasi)

Dimensi ini diproduksi melalui kekuatan politik, ekonomi, dan institusional, khususnya kepentingan kapitalis yang membingkai kawasan rural dalam sistem produksi, pertukaran, dan tata kelola. Representasi rural sering kali mengandung

idealisasi (*pastoral idyll*), eksotisasi, atau instrumentalisasi untuk tujuan ekonomi (pariwisata, ekstraksi sumber daya).



Gambar 2.1.1.1. Tiga dimensi ruang rural oleh Halfacree (2006)

Woods (2011) dalam *Rural: Key Ideas in Geography* memperluas pemahaman ini dengan menekankan bahwa ruralitas adalah konstruksi sosial yang diperebutkan. Makna "rural" tidak tetap, melainkan hasil dari negosiasi antara berbagai diskursus: administratif (definisi pemerintah), fungsional (basis ekonomi), sosial-kultural (gaya hidup dan identitas), dan representasional (citra dalam media dan kebijakan). Woods berpendapat bahwa kawasan rural kontemporer tidak dapat lagi dipahami dalam oposisi biner dengan urban, melainkan sebagai ruang hibrid yang mengalami proses-proses globalisasi, mobilitas, dan restrukturisasi ekonomi yang menghasilkan bentuk-bentuk baru ruralitas.

2.1.2. Konsep desa

Dalam konteks Indonesia, "desa" memiliki dimensi legal-administratif dan sosio-kultural yang spesifik. Secara legal, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sosiokultural, desa Indonesia; khususnya desa Jawa; dicirikan oleh sistem sosial gotong royong, struktur komunal yang kuat, dan relasi erat dengan tanah dan sumber daya alam. Namun, desa-desa pesisir dan maritim memiliki karakteristik berbeda dari desa agraris pedalaman, orientasi spasial yang lebih terbuka (menghadap laut), struktur ekonomi yang lebih beragam dan fluktuatif (tergantung musim ikan), serta mobilitas yang lebih tinggi (tradisi pelayaran).

2.1.3. Transformasi Rural dan Desa

Penelitian tentang ruralitas menunjukkan bahwa penetrasi pariwisata menghasilkan perubahan fundamental dalam ketiga dimensi Halfacree. Pada dimensi *locality*, infrastruktur pariwisata (bandara, resort, jalan) mengubah organisasi spasial dan mengalihkan penggunaan lahan dari produktif (pertanian, perikanan) ke konsumtif (rekreasi, akomodasi). Pada dimensi *lives*, penduduk rural mengalami reorientasi identitas dan praktik sehari-hari; dari produsen (petani, nelayan) menjadi penyedia jasa (pemandu, pemilik homestay). Pada dimensi *representation*, kawasan rural dikonstruksi ulang sebagai destinasi wisata: objek konsumsi visual dan eksperiensial bagi wisatawan urban (Woods, 2011).

Pergeseran dari produsen menjadi penyedia jasa yang dialami masyarakat rural akibat penetrasi pariwisata tidak sekadar mengubah struktur ekonomi dan tata ruang, tetapi juga menyentuh lapisan yang lebih dalam: bagaimana masyarakat memaknai diri mereka sendiri dan lingkungan tempat mereka hidup. Transformasi pada dimensi *representation* menunjukkan bahwa ketika kawasan rural dikonstruksi ulang sebagai objek konsumsi wisatawan, sistem makna yang selama ini dibangun dari dalam komunitas mulai bergeser

mengikuti permintaan dari luar. Untuk memahami sejauh mana pergeseran ini berdampak pada identitas dan praktik masyarakat Kemujan, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan budaya sebagai sistem makna itu sendiri.

2.2. Pengertian Budaya

2.2.1. Budaya sebagai sistem makna

Clifford Geertz (1973) dalam *The Interpretation of Cultures* mendefinisikan budaya sebagai:

"...a historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life."

Definisi Geertz menekankan budaya sebagai sistem simbolik, bukan hanya perilaku yang terobservasi, tetapi makna yang terkandung dalam simbol-simbol yang melaluinya orang menginterpretasi pengalaman dan membimbing tindakan mereka. Budaya, dalam pandangan ini, adalah teks yang harus dibaca dan diinterpretasi. Pendekatan interpretatif Geertz berpengaruh besar dalam antropologi dan studi budaya, menekankan *thick description*; deskripsi mendalam yang menangkap lapisan-lapisan makna dalam praktik budaya.

2.2.2. Budaya sebagai cara hidup

Raymond Williams (1983) dalam *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society* mengidentifikasi bahwa "budaya" adalah salah satu kata paling kompleks dalam bahasa Inggris, dengan tiga penggunaan utama:

1. Proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetika. Budaya sebagai kultivasi, pendidikan, pencerahan.
2. Cara hidup tertentu dari suatu masyarakat, periode, atau kelompok. Budaya sebagai keseluruhan praktik sosial, nilai, dan institusi yang membedakan satu kelompok dari yang lain.
3. Karya dan praktik aktivitas intelektual dan artistik. Budaya sebagai seni, sastra,

musik, dan produksi simbolik lainnya.

Williams, sebagai tokoh ilmu kebudayaan, menekankan bahwa budaya tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan ekonomi. Budaya adalah keseluruhan cara hidup (*whole way of life*) yang mencakup praktik material dan simbolik sekaligus. Ia mengkritik pemisahan antara "budaya tinggi" dan "budaya populer," dan menekankan bahwa semua praktik sosial memiliki dimensi kultural.

2.2.3. Budaya sebagai medan kekuasaan

Pierre Bourdieu (1977) dalam *Outline of a Theory of Practice* memperkenalkan konsep *habitus*: disposisi yang tertanam dalam tubuh dan pikiran melalui sosialisasi, yang membimbing praktik tanpa secara sadar mengikuti aturan. Budaya, dalam pandangan Bourdieu, adalah medan di mana kapital simbolik diperebutkan dan relasi kekuasaan direproduksi. Praktik budaya bukan hanya ekspresi makna, tetapi juga strategi dalam permainan sosial untuk mempertahankan atau mengubah posisi dalam struktur sosial.

Stuart Hall (1997) dalam *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* menekankan bahwa budaya adalah tentang produksi dan pertukaran makna, bagaimana anggota suatu kelompok menggunakan bahasa, tanda, dan citra untuk memproduksi dan mengkomunikasikan makna. Hall menekankan bahwa representasi budaya selalu melibatkan kekuasaan—siapa yang memiliki kekuatan untuk mendefinisikan, untuk merepresentasikan, untuk membuat makna tertentu menjadi dominan.

2.2.4. Kesimpulan definisi budaya

Menyimpulkan berbagai pendekatan di atas, budaya dapat dipahami sebagai sistem makna, praktik, dan representasi simbolik yang ditransmisikan secara historis dan dipelajari secara sosial, yang menstrukturkan kehidupan kolektif, membentuk disposisi dan strategi, tindakan, memediasi identitas dan komunikasi, serta mereproduksi relasi material dan kekuasaan dalam konteks sosial spesifik. Definisi ini mengakui bahwa budaya adalah:

1. Historis: ditransmisikan antar generasi tetapi terus berubah
2. Sosial: dipelajari dan dibagikan dalam kelompok
3. Struktural: membentuk cara orang berpikir dan bertindak
4. Simbolik: beroperasi melalui sistem makna
5. Material: terkait dengan praktik ekonomi dan organisasi sosial
6. Politis: melibatkan relasi kekuasaan dan kontestasi

Pemahaman budaya sebagai sistem yang sekaligus historis, sosial, struktural, simbolik, material, dan politis menjadi penting ketika dihadapkan pada konteks di mana sistem tersebut bertemu dengan kekuatan eksternal yang bekerja dengan logika berbeda. Pariwisata adalah salah satu kekuatan eksternal yang paling intensif dalam membentuk ulang sistem makna suatu komunitas; ia tidak hanya mengubah penggunaan ruang dan struktur ekonomi, tetapi juga masuk ke dalam lapisan simbolik dan politis budaya, mengkonstruksi ulang identitas lokal menjadi produk yang dapat dikonsumsi. Di Indonesia, proses ini berlangsung dalam konteks kebijakan, sejarah, dan relasi kuasa yang khas, sehingga perlu dipahami secara spesifik bagaimana pariwisata berkembang dan beroperasi dalam skala nasional sebelum membacanya di tingkat lokal Kemujan.

2.3. Budaya dan Pariwisata

2.3.1. Budaya dan Pariwisata di Indonesia

Paradigma dominan dalam kebijakan pariwisata di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah *tourism-led development*, pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. UNWTO (United Nations World Tourism Organization) mempromosikan pariwisata sebagai strategi pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur di kawasan rural dan terpencil.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pariwisata sejak era Orde Baru hingga saat ini menekankan pengembangan destinasi wisata sebagai sumber devisa dan pembangunan daerah. Penetapan kawasan konservasi seperti Taman Nasional sering kali dikombinasikan dengan promosi pariwisata, model yang disebut *ecotourism* atau *nature-based tourism* dengan asumsi bahwa pariwisata dapat memberikan insentif ekonomi untuk konservasi sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

2.3.2. Pengaruh pariwisata

Britton (1982) dalam "The Political Economy of Tourism in the Third World" berpendapat bahwa pariwisata internasional di negara berkembang cenderung menghasilkan struktur dependensi—modal, teknologi, dan kontrol manajemen berada di tangan perusahaan transnasional atau elite urban, sementara masyarakat lokal hanya mendapat pekerjaan bergaji rendah atau manfaat ekonomi yang minimal.

Cole (2006) dalam studi tentang pariwisata di Indonesia Timur menunjukkan bahwa meskipun pariwisata membawa pendapatan baru, manfaat ekonomi seringkali tidak terdistribusi secara merata, elit lokal dan investor luar cenderung menguasai bisnis pariwisata yang menguntungkan (*resort*, *tour operator*), sementara masyarakat biasa hanya dapat berpartisipasi dalam ekonomi informal (penjual *souvenir*, *ojek*) dengan pendapatan tidak stabil.

Ketimpangan distribusi manfaat pariwisata diidentifikasi tidak terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga aspek ruang; siapa yang berhak menggunakan ruang, untuk kepentingan apa, dan bagaimana ruang tersebut didefinisikan. Ketika *resort* dan operator wisata menguasai kawasan pesisir, ruang yang sebelumnya menjadi arena praktik budaya; salah satunya budaya maritim; berpotensi tergusur atau tereduksi menjadi latar belakang visual bagi konsumsi wisatawan. Untuk memahami apa yang sesungguhnya dipertaruhkan dalam proses tersebut, perlu ditelusuri lebih dalam bagaimana ruang-ruang kebudayaan maritim terbentuk, bekerja, dan menjadi wadah bagi keberlangsungan kehidupan komunitas pesisir.

2.4. Ruang Kebudayaan Maritim

2.4.1. Definisi ruang kebudayaan maritim

Ruang kebudayaan maritim merujuk pada sistem fisik yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan transportasi yang berkaitan dengan laut. Dalam konteks komunitas nelayan tradisional, infrastruktur maritim mencakup elemen-elemen yang memfasilitasi siklus penuh aktivitas perikanan, dari persiapan, operasi penangkapan, hingga pengolahan dan distribusi hasil laut.

2.4.2. Ruang-ruang kebudayaan maritim di Indonesia

Sistem fisik yang membentuk ruang kebudayaan maritim tumbuh membentuk ritme kehidupan komunitas yang menggunakannya. Setiap elemen ruang hadir karena ada aktivitas yang membutuhkannya, dan setiap aktivitas berlangsung karena ada ruang yang memungkinkannya. Hubungan timbal balik ini berarti bahwa untuk memahami bagaimana ruang kebudayaan maritim bekerja dalam kehidupan nyata, perlu dilihat secara konkret ruang-ruang apa saja yang digunakan oleh komunitas nelayan Indonesia, bagaimana ruang-ruang tersebut tersusun, dan fungsi apa yang masing-masing ruang emban dalam mendukung keberlangsungan siklus kehidupan maritim.

Berdasarkan studi tentang permukiman nelayan Indonesia (Artiningrum & Sukmajati, 2017; Hamka, 2017; Levina, 2017), infrastruktur maritim tradisional terdiri dari:

Fasilitas Pada Permukiman Nelayan		
No.	Komponen Fisik	Deskripsi
1.	Dermaga / <i>jetty</i>	Struktur yang memungkinkan perahu berlabuh dan bongkar muat
2.	Area tambatan	Ruang air yang terlindung untuk moor perahu saat tidak beroperasi
3.	<i>Slipway / ramp</i>	Jalur miring untuk menarik perahu ke darat untuk perbaikan
4.	<i>Breakwater</i>	Pemecah gelombang untuk melindungi area tambatan dari ombak

Tabel 1. Fasilitas pada permukiman nelayan

Dari hasil studi tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia banyak permukiman nelayan tradisional tidak memiliki dermaga formal dimana perahu ditambatkan di pantai atau menggunakan dermaga kayu sederhana yang dibangun secara komunal. Lokasi tambatan sering kali menjadi ruang sosial di mana nelayan berkumpul, memperbaiki jala, dan bertukar informasi.

Artiningrum dan Sukmajati (2017) dalam studi tentang Kampung Nelayan Bugis di Kamal Muara menunjukkan bahwa dalam arsitektur vernakular Bugis,

ruang di bawah rumah panggung sering digunakan untuk menyimpan perahu kecil, jala, dan peralatan. Sedangkan Ayudya et al. (2019) menunjukkan bahwa aktivitas pengolahan ikan sering terjadi di ruang semi-publik seperti area di depan rumah, di bawah rumah panggung, atau di tepi pantai yang berfungsi sebagai ruang kerja sekaligus ruang sosial di mana perempuan (yang biasanya bertanggung jawab atas pengolahan) dapat bekerja sambil berinteraksi. Levina (2017) dalam studi tentang permukiman nelayan Cilincing dan Marunda menunjukkan bahwa pasar ikan adalah pusat aktivitas sosial-ekonomi permukiman, bukan hanya tempat transaksi ekonomi tetapi juga tempat bertukar informasi, bersosialisasi, dan negosiasi sosial. Hamka (2017) dalam studi tipomorfologi permukiman nelayan Bajoe, Bone (komunitas Bugis) menunjukkan bahwa galangan kapal tradisional sering kali menjadi landmark permukiman dan ruang di mana pengetahuan maritim ditransmisikan antar generasi.



Gambar 2.4.2.1. Dermaga nelayan Cilincing
(Sumber: antarafoto.com)

Dari berbagai studi tersebut, ruang-ruang kebudayaan maritim pada

permukiman nelayan Indonesia tidak bekerja sebagai fungsi tunggal, melainkan sebagai ruang berlapis yang secara bersamaan menampung aktivitas ekonomi, sosial, dan transmisi pengetahuan. Yang menarik adalah bahwa ruang-ruang yang paling signifikan sebagai arena pertukaran pengetahuan dan keberlangsungan budaya justru bukan ruang formal atau monumental, melainkan ruang-ruang ambang dan semi-publik: area di bawah rumah panggung tempat peralatan disimpan dan perahu dirawat, tepi pantai tempat perempuan mengolah hasil laut sambil berinteraksi, pasar ikan tempat informasi dan negosiasi berlangsung, serta galangan kapal tempat teknik konstruksi dan pengetahuan maritim diturunkan dari tangan ke tangan. Ruang-ruang inilah yang sesungguhnya menjadi medium transmisi budaya, bukan karena dirancang untuk itu, tetapi karena aktivitas yang berlangsung di dalamnya secara alamiah mempertemukan generasi, mengharuskan kolaborasi, dan menghidupkan pengetahuan melalui praktik langsung. Keberlangsungan budaya maritim dengan demikian sangat bergantung pada keberlangsungan ruang-ruang ambang ini sebagai arena kehidupan sehari-hari.

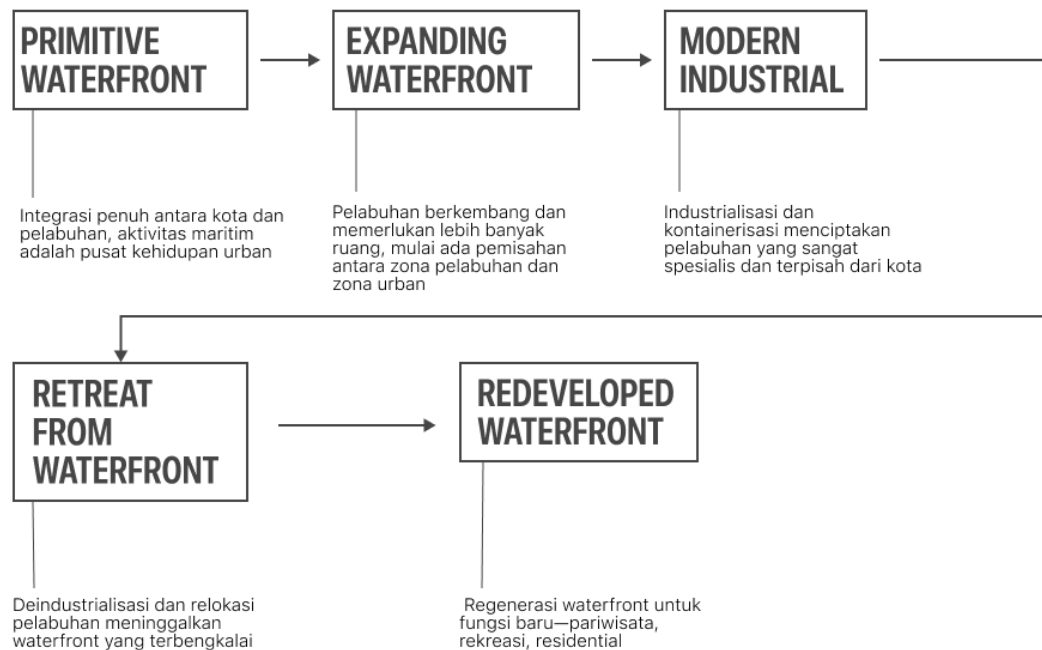
Transmisi kebudayaan melalui ruang-ruang ambang terjadi melalui interaksi dan percakapan yang muncul. Namun dapat dipahami bahwa ruang tersebut selalu berada dalam hubungan langsung dengan elemen yang menghubungkan daratan dan laut. Titik pertemuan antara keduanya, yakni kawasan tepi air atau *waterfront*, menjadi panggung utama di mana seluruh lapisan aktivitas maritim; ekonomi, sosial, ritual, dan transmisi pengetahuan; bertemu dan saling menopang. Jika ruang di bawah rumah panggung dan galangan kapal adalah tempat pengetahuan diwariskan, maka *waterfront* adalah tempat pengetahuan itu digunakan, diuji, dan diperbarui setiap harinya. Memahami bagaimana infrastruktur *waterfront* terbentuk dan bekerja sebagai ruang kebudayaan maritim menjadi langkah berikutnya yang penting untuk membaca sejauh mana fisik kawasan pesisir dapat mewadahi kehidupan komunitas nelayan secara utuh.

2.5. Infrastruktur Waterfront Sebagai Ruang Kebudayaan Maritim

2.5.1. Definisi *waterfront*

Waterfront atau kawasan tepi air adalah zona transisi antara daratan dan perairan yang secara historis berfungsi sebagai *working waterfront*, yaitu tempat

aktivitas ekonomi produktif seperti pelabuhan, galangan kapal, pergudangan, dan industri pengolahan hasil laut. Namun, sejak pertengahan abad ke-20, banyak waterfront di dunia mengalami transformasi dari fungsi produktif menjadi fungsi konsumtif seperti rekreasi, pariwisata, residensial, dan komersial (Hoyle, 2000).



Gambar 2.5.1.1. Diagram model evolusi *waterfront* (teori oleh Hoyle, 2000)

Banyak *waterfront* di Indonesia, khususnya di pulau-pulau kecil, masih berada di tahap 1-2 dimana integrasi antara aktivitas maritim produktif dan kehidupan komunitas. Namun, tekanan pariwisata mendorong lompatan langsung ke tahap 5 tanpa melalui proses deindustrialisasi, menghasilkan konflik antara fungsi produktif yang masih aktif dan aspirasi untuk waterfront rekreasional.

2.5.2. Prinsip desain *waterfront*

Prinsip fundamental dalam desain waterfront adalah public access, bukan diprivatisasi oleh kepentingan komersial (Breen & Rigby, 1996). Namun, dalam konteks *working waterfront*, akses publik harus diseimbangkan dengan kebutuhan operasional: keselamatan, keamanan, dan efisiensi operasi maritim.

Waterfront adalah zona yang rentan terhadap perubahan iklim seperti

kenaikan muka air laut, badai, banjir rob. Desain *waterfront* kontemporer harus adaptif dan resilient (Nordenson et al., 2010) dengan membuat elevasi bangunan dan infrastruktur di atas level banjir, *soft engineering* (mangrove, wetlands) untuk perlindungan pantai, infrastruktur yang dapat tergenang tanpa rusak (amphibious design), fleksibilitas untuk relokasi atau modifikasi seiring perubahan kondisi.



Gambar 2.5.1.2. *Waterfront* Marina Labuan Bajo
(Sumber: Good News from Indonesia)

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur zonasi wilayah pesisir yang membagi kawasan pesisir menjadi zona-zona dengan fungsi berbeda (konservasi, pemanfaatan, dll.) dan mengatur sempadan pantai yaitu kawasan tertentu sepanjang pantai yang memiliki manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian pantai.

Pengalaman pengembangan waterfront di Indonesia sendiri menunjukkan spektrum yang luas antara dua fungsi; waterfront sebagai ruang produktif komunitas, dan waterfront sebagai proyek representasi yang menggeser fungsi tersebut. Waterfront Makassar, khususnya kawasan Pantai Losari, mengalami transformasi dari ruang publik informal yang semula dipenuhi aktivitas pedagang

dan warga pesisir menjadi promenade formal yang lebih berorientasi pada citra kota dan konsumsi wisatawan, dengan pedagang kaki lima yang secara bertahap ditertibkan dari tepiannya. Proyek Marina Labuan Bajo yang dikembangkan dalam kerangka Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menunjukkan kecenderungan serupa; waterfront dikembangkan terutama untuk melayani industri kapal wisata dan akomodasi premium, sementara nelayan tradisional menghadapi tekanan relokasi dari kawasan yang sebelumnya menjadi basis operasional mereka. Waterfront Sunda Kelapa di Jakarta, sebaliknya, masih mempertahankan karakter *working waterfront* dengan kehadiran kapal pinisi dan aktivitas bongkar muat tradisional, menjadikannya salah satu contoh langka di mana ruang tepi air masih berfungsi sebagai arena transmisi pengetahuan dan praktik maritim secara nyata.



Gambar 2.5.1.3. *Waterfront* Sunda Kelapa Jakarta
(Sumber: expedia.com)

Waterfront dengan demikian bukan sekadar batas fisik antara daratan dan laut, melainkan ruang yang secara inheren bersifat publik, produktif, dan rentan sekaligus; tiga sifat yang justru menjadikannya paling relevan sebagai ruang kebudayaan maritim. Prinsip *public access* yang menjadi pondasi desain *waterfront* selaras dengan karakter budaya maritim yang pada dasarnya kolektif: aktivitas bongkar muat, perdagangan hasil tangkapan, perawatan perahu, hingga

ritual sedekah laut semuanya membutuhkan ruang yang terbuka dan dapat diakses bersama. Di sisi lain, tuntutan adaptasi terhadap perubahan iklim justru menggemakan kearifan komunitas nelayan yang sejak lama membangun kehidupan dengan merespons dan bukan melawan dinamika alam. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa regulasi zonasi pesisir melalui UU No. 27 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang seharusnya melindungi fungsi produktif kawasan ini dari privatisasi komersial. Dengan demikian, waterfront yang dirancang dengan baik berpotensi menjadi infrastruktur yang secara aktif mempertahankan tempat pengetahuan, praktik, dan identitas budaya maritim terus hidup dan diwariskan.



Gambar 2.5.1.4. Ruang publik pada *Waterfront* Marina Labuan Bajo

(Sumber: Good News from Indonesia)